

**SKRIPSI**

**PATRIA WIJAYATI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK  
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA  
DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

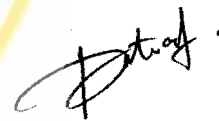
**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN DALAM  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

**Pembimbing,**



**Endang Sayekti, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 131 953 746**

**Penyusun,**



**Patria Wijayati**  
**NIM. 030115164**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2005**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Pada dasarnya hak asasi manusia dimiliki oleh setiap individu secara langsung semenjak dilahirkan. Dengan demikian anak juga memiliki hak asasi yang sama besarnya dengan orang dewasa. Perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja anak dalam instrumen hukum Internasional berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*, artinya bahwa *Universal Declaration of Human Rights* sebagai standar universal tentang hak-hak asasi manusia yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum seperti, hak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keselamatan, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi pekerja anak diatur didalam Konvensi ILO No. 138 tentang Batasan Minimum Usia Untuk Diperbolehkan Bekerja, diatur mengenai usia minimum yang ditetapkan untuk dapat bekerja tidak boleh kurang dari usia tamat belajar, yaitu 15 (lima belas) tahun dalam keadaan apapun. Ketentuan dalam Konvensi ILO No. 138 mengenai batasan usia untuk diperbolehkan bekerja sejalan dengan Konvensi ILO No. 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dijelaskan mengenai



pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk kerja anak, dengan memperhatikan bahwa kerja anak diakibatkan oleh kemiskinan yang penghapusannya perlu dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja anak. Sedangkan perlindungan mengenai pekerja anak dalam hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara umum tentang hak asasi manusia di Indonesia berupa hak untuk hidup, hak beragama dan beribadah, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk berpendapat dan hak-hak asasi lainnya yang menyangkut kehidupan manusia. Hal tersebut kemudian menjadi dasar pengaturan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang di dalamnya telah diatur mengenai hak asasi para pekerja anak yang harus dipenuhi oleh para pengusaha yang mempekerjakan mereka. Adapun hak-hak pekerja anak yang harus dipenuhi antara lain hak untuk memperoleh jaminan kesehatan, hak untuk memperoleh upah yang sesuai, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap eksploitasi ekonomi dan atau fisik, dan hak untuk tidak bekerja di dalam pekerjaan-pekerjaan yang tidak layak seperti narkoba, pornografi, prostitusi serta berbagai hak lainnya yang menyangkut hak asasi pekerja anak di Indonesia.

b. Dimuatnya substansi hak asasi manusia tentang pekerja anak dalam Undang-Undang ketenagakerjaan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan perlindungan Pemerintah terhadap para pekerja anak yang ada di Indonesia. Akan tetapi dalam kenyataannya, masih banyak hambatan yang ada dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja anak di Indonesia. Hambatan tersebut berupa kurangnya kesadaran hukum, perbedaan kepentingan antara Pemerintah, pengusaha dan masyarakat, lemahnya peraturan perundang-undangan yang ada, dan tidak adanya aparat hukum yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak. Berbagai hambatan itulah yang menyebabkan penerapan hak asasi manusia yang untuk para pekerja anak yang telah diatur dalam Undang-Undang ketenagakerjaan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal tersebut menyebabkan seringkali terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pekerja anak yang tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Sehingga perlindungan hukum terhadap para pekerja anak tidak dapat secara efektif dilaksanakan.

## 2. Saran

a. Pemerintah perlu untuk lebih mensosialisasikan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja anak dan kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat pada umumnya

serta pengusaha dan para pekerja anak pada khususnya. Hal ini perlu untuk dilaksanakan agar tercapai kesadaran hukum dan kesamaan pandangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak di Indonesia.

- b. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap para pekerja anak, maka adalah perlu untuk membentuk sebuah undang-undang tentang perlindungan pekerja anak yang secara khusus dan spesifik mengatur mengenai hak-hak pekerja anak, badan pengawasan dan perlindungan pekerja anak, aparat yang berwenang melakukan perlindungan hukum kepada pekerja anak, dan disertai sanksi-sanksi yang jelas terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak asasi para pekerja anak di Indonesia.
- c. Pemerintah perlu untuk membentuk sebuah badan khusus yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan terhadap para pekerja anak dan juga terhadap para pengusaha yang mempekerjakan pekerja anak, serta berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak para pekerja anak di Indonesia